

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG SUBSIDI
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUHUL KUDUS

NIM. 210802100

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Nuhul Kudus
NIM : 210802100
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Keude Siblah, 17 Agustus 2003
Alamat : Lamgapang, Krung Barona Jaya, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,



NUHUL KUDUS

NIM. 210802100

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA”

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

NUHUL KUDUS
NIM. 210802100

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Saïd Amirul Kamar. M.M., M. Si

NIP. 196110051982031007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SRKIPSI

“IMPEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KG SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA”

SKRIPSI

NUHUL KUDUS

NIM. 210802100

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 mei, 2025
24 Dzulqa'dah 1446 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Said Amirul Kamar. MM., M. Si
NIP. 196110051982031007

Evi Yusanaini, S.AP
NIP.

Penguji I,

A R - R A N I R Y

Penguji II,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Liquefied petroleum Gas (LPG) 3 Kg merupakan salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) dan mendapatkan subsidi langsung oleh pemerintah. Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah memberikan berbagai manfaat. Namun pada proses pendistribusian Gas 3 Kg LPG masih sering mengalami berbagai penyimpangan. Penyimpangan dalam distribusi ini sangat terasa di kalangan Masyarakat selaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tahap proses implementasi kebijakan pendistribusian gas 3 Kg LPG subsidi dan bagaimana penerapan Harga Eceran Tetap (HET) gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metodologi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada tahapan pendistribusian gas 3 kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya belum terselenggara dengan baik atau masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga ini menjadi hambatan utama dalam memastikan tepat sasaran. Dalam ketepatan harga gas LPG subsidi 3 Kg ini juga masih belum stabil yang dimana masih ada beberapa pangkalan yang masih menjual di atas harga eceran tetap (HET). Dalam memastikan ketersediaan stok juga belum maksimal, Pangkalan sering mengalami kekosongan stok sehingga masyarakat sulit mendapatkan gas di pangkalan. Dalam hal ini masyarakat lebih sering menemukan gas di kios – kios dibanding pangkalan, masyarakat juga terpaksa harus membeli harga yang jauh lebih tinggi dari pangkalan.

Kata Kunci: Gas 3 Kg LPG, implementasi Kebijakan, Pendistribusian dan HET.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, serta telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban. Berkat risalah beliau, penulis memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu dan menyelesaikan tugas ini dengan berjudul: **“Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas 3 Kg LPG Subsidi di Kabupaten Aceh Barat Daya”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Zakki Fuad Khalil, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Said Amirul Kamar. M.M., M. Si. Selaku dosen pembimbing tugas akhir
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, atas doa, nasehat, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya baik materil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,

NUHUL KUDUS

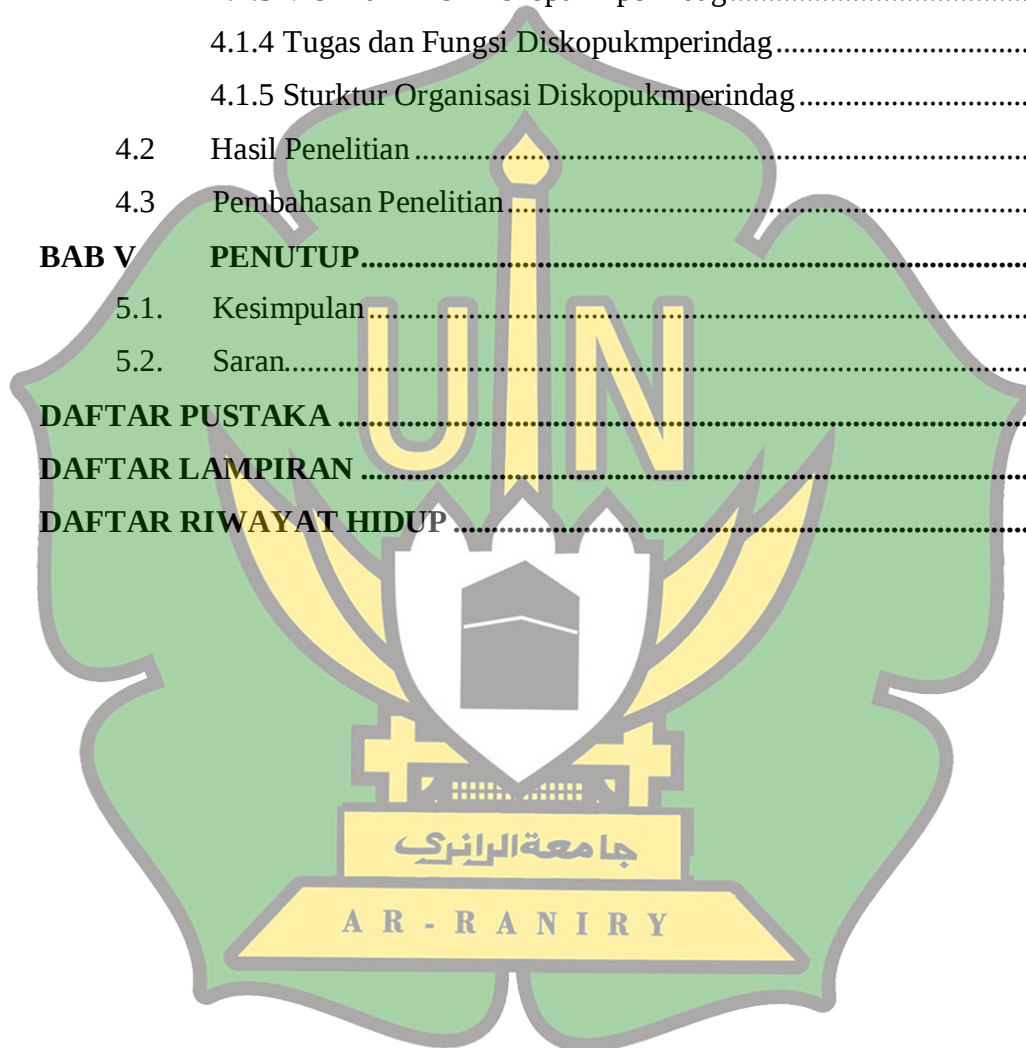
NIM. 210802100



DAFTAR ISI

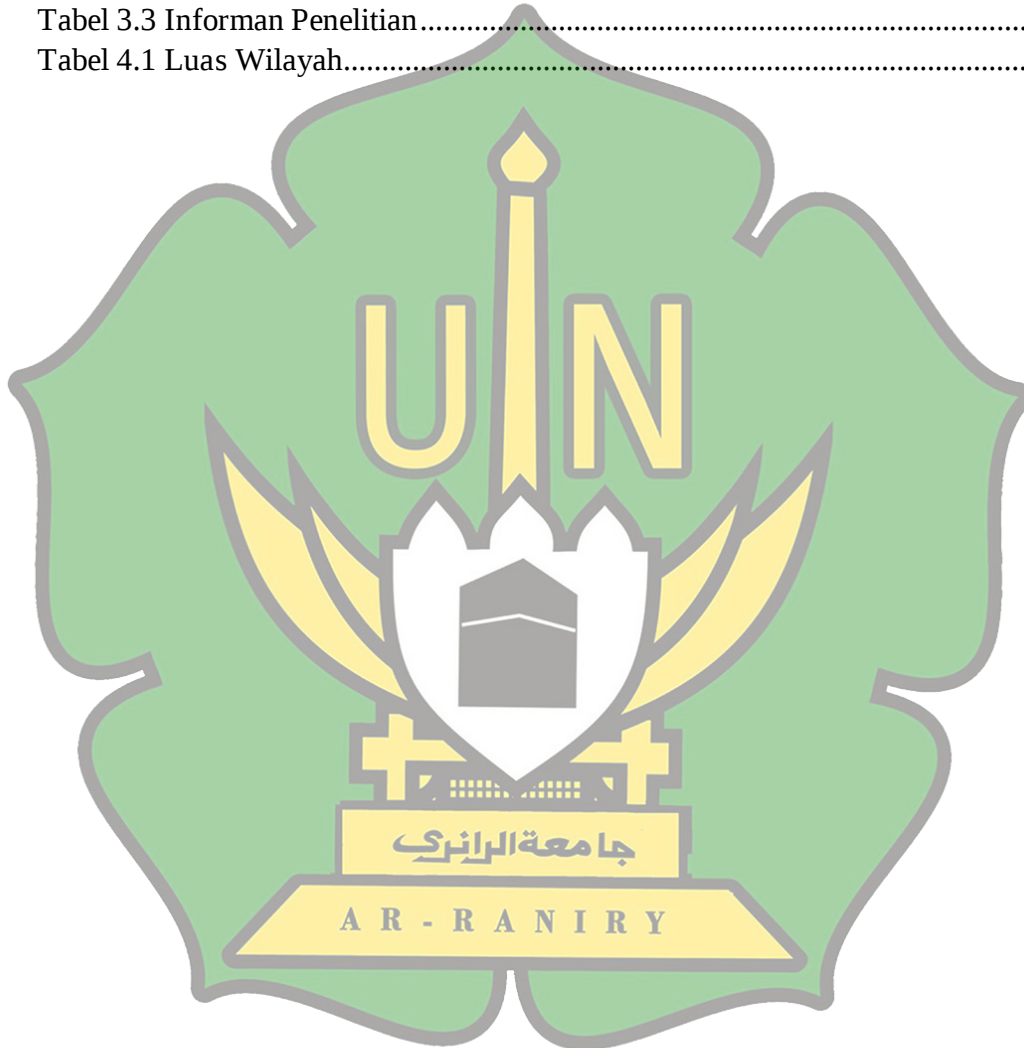
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SRKIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Teori Implementasi Kebijakan.....	14
2.3. Konsep Pendistribusian Gas LPG 3 Kg	22
2.4. Teori Pengawasan.....	30
2.5. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1	Gambaran Umum	45
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya	45
4.1.2	Gambaran Umum Diskopukmperindag	47
4.1.3	Visi Dan Misi Diskopukmperindag.....	48
4.1.4	Tugas dan Fungsi Diskopukmperindag.....	49
4.1.5	Sturktur Organisasi Diskopukmperindag	50
4.2	Hasil Penelitian	51
4.3	Pembahasan Penelitian.....	71
BAB V	PENUTUP.....	76
5.1.	Kesimpulan.....	76
5.2.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79
DAFTAR LAMPIRAN		82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		84



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan indikator penelitian	39
Tabel 3.2 Dimensi dan indikator penelitian	39
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Luas Wilayah.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DiskopUKMperindag50



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1 Dokumentasi	82
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg merupakan salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) dan mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah. Subsidi adalah bantuan atau dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau badan usaha dengan tujuan untuk mendorong atau menjaga kegiatan ekonomi tertentu serta mengurangi beban finansial masyarakat. Subsidi dapat berupa pembayaran langsung dalam bentuk dana aktual, hibah, atau fasilitas lain seperti keringanan pajak dan penurunan harga barang atau jasa yang penting bagi Masyarakat. Barang subsidi ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari subsidi ini adalah untuk mendorong masyarakat, khususnya pengguna minyak tanah, agar beralih ke penggunaan LPG sebagai sumber energi alternatif.¹

Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah memberikan berbagai manfaat. Selain mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kebijakan ini juga berkontribusi dalam menekan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain,

¹ Aprianti, S. L., "Dampak Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kg Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah," 2022.

penggunaan LPG juga lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi secara berlebihan dibandingkan minyak tanah.²

Adapun Liquefied Potroleum Gas (LPG) Sebagaimana Suoth, L., Lioamdo., & Tasik, menyebutkan bahwa “Program konversi ini muncul sebagai akibat dari kian menipisnya stok minyak tanah di kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Diharapkan program ini akan membantu mengurangi kelangkaan minyak tanah dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.”³.

Dari tahun ke tahun konsumsi LPG subsidi 3 Kg terus melonjak sehingga membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Agar pendistribusian LPG 3 Kg tepat sasaran, mulai 1 Januari 2024, pemerintah menetapkan LPG subsidi 3 Kg hanya boleh digunakan oleh mereka yang sudah terdaftar. Pengguna LPG subsidi 3 Kg dapat memeriksa statusnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) di sub- penyalur/pangkalan resmi.

Bagi yang belum terdata, wajib mendaftar terlebih dahulu sebelum bisa membeli tabung LPG subsidi 3 Kg. Caranya cukup mudah, hanya perlu menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di sub- penyalur/pangkalan resmi. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua pihak bisa menggunakan tabung LPG subsidi 3 Kg. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 dan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2019, tabung LPG subsidi 3 Kg

² Karmilawati Dwi Rahayu et al., “Analysis Of The Causes Of The Scarcity Of 3 Kg LPG Gas Among The People Of Bengkalis Regency,” *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences* 2, no. 4 (2023): 151–61, <https://doi.org/10.58355/historical.v2i4.90>.

³ Lingkan South, Daud Markus Liando, and Femmy C. M. Tasik, “Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3, no. 45 (2018): 1–10.

hanya boleh digunakan untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro, nelayan dan petani.⁴

Berdasarkan surat edaran direktur jendral migas no. B-2461/MG.05/DJM/2022, menyebutkan bahwa pembisnis restoran, hotel, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha penatu (binatu), usaha batik, usaha tani tembakau, serta usaha jasa las, dilarang menggunakan tabung LPG subsidi 3 Kg.⁵

Dasar kebijakan yang mengatur tentang gas 3 kg LPG subsidi melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagai dasar kebijakan dalam implementasi penyediaan dan pendistribusiannya. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG, yang memperoleh penugasan resmi dari Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan minyak dan gas bumi.⁶ Penugasan ini mencakup tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pasokan LPG serta menjamin keterjangkauan distribusi hingga ke tingkat konsumen akhir.

Sementara itu, penyalur LPG adalah koperasi, pelaku usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang secara resmi ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG. Penyalur inilah yang

⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga” 2004 (2007): 1–9.

⁵ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemintah-minta-pemda-turut-awasi-pengendalian-lpg-3-kg>

⁶ Menteri Dalam Negeri, “Permen Bersama No. 17 Dan 5 Thn 2011,” 2011, 1–11.

bertugas untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG kepada konsumen, khususnya masyarakat penerima manfaat subsidi LPG tabung 3 kg.

Pendistribusian Gas 3 Kg LPG masih sering mengalami penyimpangan hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Penyimpangan dalam distribusi ini sangat terasa di kalangan masyarakat ekonomi kelas ke bawah selaku konsumen. Sehingga banyak masyarakat masih sangat sulit mendapatkan gas 3 Kg LPG dan juga harga jual yang masih berada di atas HET (Harga Eceran Tetap).⁷

Dalam hal ini pengeluaran masyarakat akan dipengaruhi langsung oleh kenaikan harga yang terjadi di masyarakat. Gas 3 Kg LPG subsidi banyak digunakan oleh pedagang kecil dan usaha kecil menengah. Konsumen rumah tangga juga menggunakannya. Oleh sebab itu, karena terjadinya penyimpangan ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lemah, maka oleh sebab itu diperlukan upaya yang serius untuk menangani masalah ini.

Dalam perkembangan Harga Eceran Tertinggi (HET) secara nasional sebagaimana Menteri E-SDM dan Mineral menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. peraturan bersama mendagri dan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 dan 7 Tahun 2011 tentang pengawasan distribusi tertutup lpg di daerah 3 kg minyak bumi cair menentukan pasokan, distribusi dan harga tabung gas.⁸

⁷ Lutfiani Dwi Lestari, Meita Dwi Rahmawati, and Minhatul Hasna, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG Subsidi Di Indonesia," *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)* 2, no. 2 (2023): 112–21, <https://doi.org/10.59525/jess.v2i2.310>.

⁸ Menteri Dalam Negeri, "Permen Bersama No. 17 Dan 5 Thn 2011."

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Aceh Barat Daya berkenaan gas 3 Kg LPG. Dalam proses pendistribusian gas 3 Kg ini masih banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan serta ketidakpastian harga yang dibeli oleh masyarakat. Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sering kali terpaksa membeli Gas tersebut diatas harga eceran tertinggi (HET) mulai dari 25 ribu pertabung hingga sampai 30 ribu per tabung. Padahal Gas LPG 3 kg mayoritas digunakan masyarakat menengah ke bawah dan disubsidi langsung oleh pemerintah seharusnya dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Adapun hal lain yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya ialah seringnya mengalami kekosongan stok atau terjadinya kelangkaan di pangkalan, sehingga masyarakat harus membeli gas tersebut di kios-kios yang tidak memiliki izin atas penjualan gas 3 Kg LPG, tentunya harga yang harus dibeli oleh Masyarakat akan berbeda dengan harga di pangkalan atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 461/ 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kilogram (Kg) di pangkalan senilai Rp22.500 pertabung dengan rincian harga agen ke pangkalan/sub penyalur sebesar Rp18.500 pertabung dan tidak boleh melebihi harga tersebut. Dalam hal ini, Pangkalan juga diminta untuk mematuhi aturan yang ada, terkait

larangan pihak pangkalan untuk tidak diperbolehkan menjual ke pihak pengecer.

Penyimpangan dalam proses pendistribusian Gas 3 Kg LPG pada tataran implementasi ini bukan masalah biasa karena masalah Gas 3 Kg LPG memiliki hubungan langsung dengan masyarakat umum dan memengaruhi tingkat kehidupan masyarakat,⁹ Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Nomor 28 Tahun 2021, yang berfungsi sebagai dasar kebijakan untuk implementasi penyediaan dan pendistribusian, harus diteliti secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah tersebut. Siklus kebijakan publik terdiri dari kebijakan implementasi, menurut studi keilmuan administrasi publik.¹⁰

Berdasarkan berbagai isu dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti melihat adanya urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan Gas 3 Kg LPG. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul: “Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Subsidi di Kabupaten Aceh Barat Daya.”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

⁹ Nurhasnah, N. “*Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kab. Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).,” 2020.

¹⁰ South, Liando, and Tasik, “Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan.”

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasikan kebijakan penyediaan dan pendistribusian gas LPG subsidi 3 Kg belum berjalan dengan baik masih mengalami penyimpangan dalam proses distribusinya.
2. Belum adanya kepastian harga di Masyarakat selaku konsumen.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusain gas 3 Kg LPG Subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka, peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tahap proses implementasi kebijakan pendistribusian gas 3 Kg LPG subsidi dan bagaimana penerapan Harga Eceran Tetap (HET) gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini mendapatkan pengetahuan baru, menambah wawasan, informasi yang secara khusus terhadap proses pendistribusian gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini memperoleh manfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut;

1. Bagi pemerintah ialah untuk melakukan pembenahan terhadap pengawasan dan mekanisme sistem peneyediaan dan pendistribusian serta penetapan Harga Eceran Tetap (HET) gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bagi Masyarakat ialah untuk menambah informasi terkait penyebab dari sering terjadinya penyimpangan dan membuat harga yang bervariasi atau tidak stabil gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bagi peneliti ialah untuk menambah informasi, pengetahuan baru, wawasan baru, tentang implementasi kebijakan peneyediaan dan pendistribusian gas 3 Kg LPG subsidi di kabupaten Aceh Barat Daya.